

Tinjauan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan PT PLN (Persero) 2023: Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Evaluasi Kinerja

Syifa Nida Zahra^a

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Ade Nelly^b

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Ricky Denis Agustin^c

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Kholida Atiyatul Maula^d

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Seia Piantara^e

Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 14, No. 2, Desember 24

Halaman : 13 – 22

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

akuntabilitas, transparansi, laporan, kinerja, PLN.

JEL classifications :

Contact Author :

^a syifanida91@gmail.com

^b adenelly2134@gmail.com

^c denisricky05@gmail.com

^d kholida.maula@fe.unsika.ac.id

^e seia.piantara23@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada evaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2023. Sebagai perusahaan BUMN yang memegang peranan krusial dalam penyediaan energi listrik nasional, PT PLN memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan kepada publik. Melalui analisis mendalam terhadap laporan keuangan PT PLN tahun 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja akuntansi yang relevan dan membandingkan laporan keuangan PT PLN dengan praktik-praktik terbaik perusahaan sejenis. Indikator yang digunakan meliputi kelengkapan pengungkapan informasi, kejelasan penyajian, dan konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi, seperti regulasi pemerintah, tekanan dari pemangku kepentingan, dan perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya. Namun, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti pengungkapan informasi yang lebih detail mengenai risiko lingkungan dan sosial, serta peningkatan kualitas audit internal. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja PT PLN. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, PT PLN dapat memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang terpercaya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan suatu perusahaan dari laporan keuangan yang diterbitkannya dengan melihat informasi posisi dan kondisi keuangannya (Husna et al., 2024). Keputusan yang dibuat oleh pengguna internal dan eksternal dipengaruhi oleh informasi keuangan yang dapat diandalkan (Yuniar et al., 2023). Pelaporan keuangan sektor publik meningkatkan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Yuniar et al., 2023). Akuntabilitas dan transparansi

menjadi landasan utama dalam pengelolaan sektor publik (Sari & Muslim, 2023). Untuk menjamin hak prerogatif, akuntabilitas mengacu pada kesadaran bahwa setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi harus memenuhi tanggung jawab yg diembannya (Musfirah, Nurlaila, Nasution, 2024). Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat, transparansi keuangan sektor publik berarti pengungkapan informasi keuangan yang adil, akurat, dan lengkap (Yunia & Muttaqin, 2022).

PT. PLN (Persero) bekerja di bidang energi listrik dan diharapkan mampu bertanggung jawab penuh dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, kinerja keuangan PT. PLN (Persero) sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan. Industri dan manufaktur serta kelangsungan hidup masyarakat bergantung pada PT PLN (Persero). Analisis laporan keuangan adalah proses menemukan, menilai, dan membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya (Yusuf et al., 2021). Menganalisis laporan keuangan sangat penting agar mematuhi peraturan bisnis dan memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (Sormin et al., 2024). Laporan keuangan yang akurat dan terperinci semakin signifikan untuk PT. PLN (Persero) sebab peranannya yang esensial bagi masyarakat dan perekonomian nasional (Wikan & Habibi, 2024). Laporan keuangan menunjukkan aspek manajemen risiko, kinerja operasional, dan laba yang diperoleh, yang merupakan indikator utama efisiensi operasionalnya dalam hal evaluasi kinerja.

Berbagai tantangan dalam pelaporan keuangan menjadi penghambat transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, banyak insiden salah urus keuangan, korupsi, dan ketidakjelasan dalam laporan terus menghalangi alokasi sumber daya yang efektif (Sari & Muslim, 2023). Evaluasi laporan keuangan PT PLN (Persero) dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan menemukan hal yang perlu diperbaiki. Untuk mencapai akuntabilitas yang optimal, masalah seperti ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, kurangnya manajemen risiko, dan informasi keuangan yang tidak akurat seringkali menjadi hambatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan PT PLN (Persero), organisasi publik yang memiliki peran strategis dalam penyediaan energi di seluruh negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif dengan mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi. Hasilnya juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini berupa Analisis Deskriptif yang diambil dari data laporan keuangan PT PLN (Persero) 2023. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil laporan keuangan yang didasarkan pada satu sampel (Nasution, 2017). Dari data tersebut kami susun dan analisis untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan PT PLN (Persero). Data yang dianalisis tidak digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis; sebaliknya, hasilnya adalah gambaran tentang data yang diamati, bukan angka atau koefisien antar variabel (Salsabilla et al., 2023).

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Bersamaan dengan itu penelitian ini membantu pembaca memahami betapa pentingnya melakukan review literature (Ridwan et al., 2021). Penelitian kami selaras dengan beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian (Zubaidah & Nugraeni, 2023) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kelengkapan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PLN tahun 2023 telah disusun secara menyeluruh dan mencakup komponen utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian (CALK) konsolidasian. Kelengkapan laporan ini mencerminkan upaya PLN untuk menyediakan informasi yang transparan dan lengkap kepada para pemangku kepentingan.

Kepatuhan Standar Akuntansi

Fernandes et al., (2021) melakukan tinjauan sistematis akuntansi sektor publik di Eropa, yang menekankan pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama melalui penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (Ariyanti et al., 2023). Begitu pula, sejak 1 Januari 2016, PLN telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi menurut Pedoman Akuntansi Berbasis Umum (PABU), yang mencakup:

- Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), meliputi Standar Akuntansi Syariah (SAS).
- Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, seperti Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012, dan Peraturan OJK No. 6 POJK.04/2017.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang benar dan terbuka kepada masyarakat dianggap transparansi, yang didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat umum berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh bagaimana organisasi mengelola sumber daya yang disediakannya (Zubaidah & Nugraeni, 2023). Berdasarkan laporan keuangan PLN, transparansi informasi terlihat dari penyajian laporan keuangan yang lengkap dan jelas, pengungkapan yang mendetail mengenai kebijakan akuntansi, risiko yang dihadapi, komponen-komponen laporan keuangan serta laporan keuangan sudah dipublish ke media publik. Hal ini mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan dan hasil operasional PLN.

Akuntabilitas

PLN menunjukkan akuntabilitas dengan menyajikan laporan finansial yang transparan dan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan tersebut mencakup penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan asumsi yang digunakan, serta risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan publik. Menurut prinsip akuntabilitas, penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemegang kepentingan (Ngakil & Kaukab, 2020).

Manajemen risiko

Ketika manajemen risiko diterapkan, ada banyak tantangan. Sumber daya manusia adalah hambatan yang paling dirasakan. Ini termasuk kesadaran atau kesadaran rendah tentang manajemen risiko (Jauhari et al., 2021). PLN mengelola risiko keuangan dengan melakukan beberapa strategi. Kebijakan utama adalah meminimalkan biaya pinjaman untuk memaksimalkan nilai Grup. Untuk mencapai tujuan ini, PLN mengevaluasi risiko keuangan yang mungkin timbul, termasuk risiko likuiditas, pasar, dan kredit. Subdirektorat Manajemen Risiko dibentuk oleh grup (“SEVP Risk Management”) untuk mengembangkan kebijakan, kerangka kerja, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta memastikan implementasi yang efektif. Grup juga memantau likuiditas dengan mempertahankan jumlah kas, simpanan, dan fasilitas pinjaman yang cukup serta menggunakan jumlah kredit yang cukup dan jaminan pemerintah.

Kinerja Operasional

Kinerja adalah hasil dari mencapai atau tidaknya tujuan organisasi. Manajer organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menilai kinerja untuk mengontrol kinerja dan meningkatkannya sehingga perusahaan dapat menghindari penurunan kinerja dan keluar dari (Titioaka & Titioaka, 2021). PLN menjalankan kontrak penjualan dan pembelian energi dengan berbagai Independent Power Producers (IPP) di Indonesia. Kontrak ini umumnya berlaku selama 20 hingga 30 tahun dan mencakup pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, energi panas bumi, dan mini hidroelektrik dengan kemampuan di bawah 50 MW. Harga tenaga listrik dihitung dengan formula khusus dalam perjanjian, yang mencakup biaya modal, biaya operasi tetap, bahan bakar, dan variabel, sesuai dengan jenis pembangkit yang digunakan. Harga tenaga listrik untuk pembangkit tenaga panas bumi ditetapkan melalui formula spesifik yang disebutkan dalam kesepakatan, yang mencakup Charge Energy dan Charge Capacity.

Pemberian Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah imbalan yang diberikan oleh suatu entitas kepada seorang karyawan sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan, mungkin sebagai akibat dari pemutusan kontrak kerja (Djoko Nestri Kwartatmono, 2022). PLN menyediakan manfaat pasca-kerja yang termasuk program pensiun dan manfaat lainnya yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Manfaat pasca-kerja ini dirancang untuk mendukung karyawan selama masa kerja mereka dan setelah pensiun. Besaran imbalan ditentukan berdasarkan kinerja perusahaan pada tahun keuangan sebelumnya dan saat ini, serta peraturan pemerintah yang berlaku mengenai upah minimum dan manfaat pekerjaan. Upah minimum untuk manfaat pekerjaan sebelumnya sesuai dengan kinerja perusahaan pada tahun keuangan sebelumnya dan saat ini.

Untuk mengimbangi jasa yang diberikan karyawan, perusahaan memberikan uang yang dikenal sebagai "imbalan kerja" sesuai dengan persyaratan yang telah distujui oleh kedua belah pihak (Rompis et al., 2023). Usaha untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan sebelumnya, perusahaan membayar jumlah tetap setiap tahun berdasarkan kinerja perusahaan di tahun sebelumnya. Pembayaran ini dilakukan ketika karyawan mulai bekerja atau ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Perusahaan juga menyediakan manfaat tambahan seperti manajemen waktu, pembayaran kinerja, kepuasan karyawan, dan retensi karyawan, yang ditentukan oleh kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Laba yang diperoleh PLN

Berdasarkan laporan keuangan PLN per 30 Juni 2023, perusahaan ini berhasil mencatatkan laba yang signifikan dari berbagai sumber pendapatan dan pengelolaan biaya operasional yang efektif. Pendapatan PLN mencapai Rp 234.519.705, yang berasal dari beberapa kategori utama seperti penjualan tenaga listrik, subsidi pemerintah, kompensasi, dan pendapatan lainnya. Setelah dikurangi berbagai beban operasional seperti bahan bakar, pembelian tenaga listrik, penyusutan aset, dan biaya kepegawaian, PLN berhasil membukukan laba usaha sebesar Rp 32.286.087.

Selain itu, PLN juga mencatatkan keuntungan bersih sebelum pajak sebesar Rp 33.018.769. Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 7.101.933, laba bersih periode berjalan yang dicatat oleh PLN mencapai Rp 25.916.836. Angka ini menunjukkan keberhasilan PLN dalam mengelola pendapatannya di tengah tantangan operasional, termasuk biaya bahan bakar yang signifikan dan biaya pembelian listrik dari pemasok swasta.

Pengakuan Pendapatan dan Aset

Pendapatan dan Aset berdasarkan instruksi penelitian ini, kami tidak dapat memberikan hasil mengenai pengakuan pendapatan dan aset pada laporan finansial PT PLN (Persero) 2023. Namun, secara umum, pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan adalah pencatatan pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengikuti prinsip bahwa pendapatan harus diakui ketika entitas memperoleh hak atas pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan dari penjualan listrik dan jasa sambungan pelanggan dalam konteks PLN dilakukan berdasarkan harga dan waktu pembayaran yang disepakati. Selain itu, nilai perolehan aset PT PLN, terutama aset tetap seperti infrastruktur pembangkit dan distribusi listrik, dihitung berdasarkan akumulasi penyusutan. Tujuan pengakuan ini adalah untuk menunjukkan nilai ekonomi dari aset yang membantu operasional PLN dalam menyediakan listrik kepada masyarakat. Karena penelitian belum secara menyeluruh, maka tidak dapat memberikan hasil mengenai pengakuan pendapatan dan aset di tahun 2023.

Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengembangan Biomassa

Penggunaan co-firing atau pengolahan biomassa untuk menggantikan batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, PLN mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengolah biomassa menjadi energi, peningkatan ekonomi masyarakat. Teknologi co-firing digunakan PLN di 36 lokasi PLTU pada tahun 2022. Teknologi co-firing memiliki banyak manfaat bagi bisnis selain mengurangi emisi karbon dan menurunkan biaya operasional. Ini termasuk penurunan biaya operasi sebesar 227 miliar rupiah per tahun, peningkatan jumlah energi yang digunakan dan dijual setiap tahun sebesar 2,8 miliar rupiah, dan penghargaan 15 emas yang tepat untuk manajemen pembangkit listrik yang berasal dari PLN.

b. Difablepreneur Berdaya

Program pengembangan soft skill dan leadership telah dimulai oleh PLN bersama dengan Yayasan Menembus Batas dan Benih Baik. Selain itu, PLN menawarkan kesempatan magang dan bantuan dana bagi penyandang disabilitas. Program ini membantu 3.228 difabel. Sepanjang tahun 2022, terdapat 68 UMKM penerima manfaat dari kelompok difabel binaan PLN. Program ini, yang tersebar di 40 tempat di seluruh Indonesia, telah membantu orang disabilitas meningkatkan produktivitas, seperti yang ditunjukkan oleh penyerapan pekerja sebanyak 907 individu.

c. Rumah BUMN

Dengan bantuan Rumah BUMN, UMKM yang sebelumnya tidak memahami cara beralih ke digital dilatih untuk menjadi kompetitif di tingkat global. PLN telah mengelola 29 Rumah BUMN di seluruh Indonesia sejak 2017. Sebagai contoh, Rumah BUMN membantu menciptakan lapangan pekerjaan, membantu UMKM mendapatkan pinjaman modal, membantu naik kelas, memberikan sertifikasi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan kewirausahaan. 14.243 Rumah BUMN telah dibangun oleh PLN sepanjang tahun 2022 dan sukses merekrut sedikitnya 900 orang di seluruh Rumah BUMN PLN.

d. Perempuan Berdaya

Program PLN menggandeng perempuan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka dan meningkatkan kesadaran tentang hak mereka dan perlindungan hukum, terutama untuk meningkatkan rasa aman dan keyakinan mereka. Program pemberdayaan ini memprioritaskan perempuan rentan, seperti perempuan pra sejahtera, ibu rumah tangga, dan penyintas kekerasan seksual atau KDRT. PLN mengajar 200 perempuan dengan dan tanpa disabilitas untuk memastikan kesetaraan gender di tempat kerja dan tempat usaha. Agar wanita mampu menggunakan teknologi digital dengan cara yang inovatif, kreatif, dan penuh inisiatif, diberikan keterampilan pembuatan atau pengolahan produk. Untuk mendorong keberlanjutan usaha kaum perempuan, PLN juga memberikan bantuan modal usaha. Selain itu, PLN melakukan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan meningkatkan akses pendampingan bagi korban kekerasan, menghasilkan perempuan yang kuat.

e. Beasiswa Difabel

Dengan menyediakan tingkat pendidikan yang memadai, PLN bertujuan untuk mengubah stigma permanen pada orang-orang dengan disabilitas dengan memberikan mereka kesempatan pendidikan yang sama dengan orang lain dalam masyarakat. Program ini dinilai baik untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan dan meningkatkan kemampuan SDM, khususnya bagi kaum rentan disabilitas Indonesia, memenuhi tujuan SDGs "No One Left Behind". Selama satu tahun, PLN telah memberikan beasiswa difabel kepada dua puluh penerima beasiswa. Peserta terpilih menerima bantuan untuk biaya pendidikan dan pelatihan soft skill dan kepemimpinan. Direncanakan bahwa beasiswa ini akan menghasilkan pribadi yang siap menghadapi berbagai kesulitan.

f. Tanggap Darurat Bencana

Untuk mencegah bencana terjadi di Indonesia, PLN membentuk tim tanggap darurat. Direksi telah meminta semua Kantor Unit PLN di Indonesia untuk membentuk tim untuk menangani situasi darurat. Faktor-faktor yang membentuk kesiapsiagaan termasuk pelatihan, kesiapan relawan dan sumber daya manusia, dan persiapan peralatan tanggap darurat. Menyediakan kebutuhan logistik seperti dapur umum, sembako, makanan siap saji, obat-obatan menunjukkan kesiapan peralatan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Selain itu, PLN bersedia mengirimkan relawan ke lokasi bencana untuk mengikuti aktivitas sosial di sana. Setelah mendapatkan bantuan, melaporkan ke perseroan harus dilakukan oleh tim tanggap bencana unit setempat. Unit PLN di seluruh Indonesia menerima dana tanggap darurat untuk penanggulangan bencana sesuai kebutuhan setiap tahun melalui Surat Persetujuan Pencairan Dana Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh TJSL PLN dan EVP Komunikasi Korporat.

g. Program Sambung Listrik Gratis

Sepanjang tahun 2022, PLN telah melakukan kegiatan Sambung Listrik Gratis dengan nilai realisasi sebesar Rp 13.6 miliar, dengan penerima manfaat mencapai 12.685 orang dan mampu memberikan nilai pembuatan nilai bersama (CSV) sebesar 3.1 miliar. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses listrik yang adil bagi seluruh masyarakat.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PT PLN (Persero) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia untuk memastikan bahwa pelaporan keuangannya transparan dan akuntabel. Beberapa aplikasi penting dari PSAK di antaranya:

- PSAK 72 - Pengakuan Pendapatan: Standar ini mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan kesepakatan kontrak dengan pelanggan, yang mengharuskan entitas untuk mengakui pendapatan ketika hak atas pendapatan telah diperoleh. PLN mengakui pendapatan dari penjualan tenaga listrik dan jasa penyambungan pelanggan pada saat energi listrik atau layanan tersebut diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan kontrak dan tarif yang berlaku.

- PSAK 16 - Aset tetap: Aset tetap seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan peralatan operasional lainnya yang dimiliki PLN harus dicatat pada biaya perolehan dan disusutkan selama masa manfaatnya. Untuk memastikan bahwa nilai aset tercatat tidak melebihi nilai wajar yang bisa direalisasikan, aset tetap ini diperiksa secara berkala untuk melihat apakah ada indikasi penurunan nilai.
- PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Nilai wajar instrumen keuangan seperti utang obligasi, pinjaman jangka panjang, dan investasi jangka pendek diakui dan dilakukan penyesuaian sesuai risiko kredit. Penerapan PSAK ini memberikan panduan tentang pengukuran dan pengungkapan yang diperlukan, sehingga PLN mampu mengelola risiko finansial dengan lebih baik.
- PSAK 24 - Imbalan Kerja: Sesuai dengan PSAK 24, yang mencakup perhitungan dana pensiun, pesangon, dan tunjangan lainnya, PLN mencatat kewajiban imbalan kerja karyawan. Standar ini mengharuskan PLN untuk mengukur dan mengakui kewajiban imbalan kerja berbasis metode kredit proyeksi unit, yang mencerminkan jumlah imbalan yang diperkirakan akan dibayarkan.
- PSAK 73—Sewa: PLN mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa dalam perjanjian sewa aset, seperti kendaraan atau peralatan, sesuai dengan PSAK 73. Aset hak guna disusutkan selama masa sewa, sementara liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa masa depan, yang menunjukkan komitmen jangka panjang PLN.

Pembahasan

Laporan keuangan PT PLN tahun 2023 menunjukkan kepatuhan yang kuat dan menyeluruh terhadap peraturan akuntansi dalam setiap aspek penting. Kelengkapan ini menunjukkan komitmen PLN untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan dan publik. Ini ditunjukkan dengan informasi yang jelas dan pengungkapan mendetail mengenai kebijakan akuntansi dan risiko yang dihadapi, serta laporan keuangan yang dapat diakses publik melalui website PLN, yang membantu pemangku kepentingan dan publik memahami kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, PLN sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penganggaran dapat dilaporkan secara objektif dan jujur kepada publik. Ini menunjukkan upaya PLN untuk membangun kepercayaan publik, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, PLN tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Dengan membentuk Subdirektorat Manajemen Risiko, PLN telah mengambil langkah proaktif untuk mengendalikan risiko keuangan. Kinerja operasional yang positif ditunjukkan oleh laba usaha yang besar sebagai hasil dari pengelolaan biaya yang efisien dan kontrak yang menguntungkan dengan pemasok daya independen. Selain itu, memberikan kompensasi kerja yang adil kepada karyawan menunjukkan perhatian PLN terhadap kesejahteraan sumber daya manusia, yang sangat penting untuk membuat tempat kerja menjadi tempat yang produktif. Dalam keadaan seperti ini, PLN tidak hanya berusaha menghasilkan keuntungan tetapi juga menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Jadi, strategi manajemen risiko yang diterapkan PLN melindungi aset perusahaan dan memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang semakin penting di dunia bisnis saat ini, di mana perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan serta kepada pemegang sahamnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari analisis data dan pemaparan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tahun 2023 PT. PLN menunjukkan akuntabilitas dengan menyusun Laporan keuangan secara komprehensif dengan mematuhi standar akuntansi sesuai dengan Pedoman Akuntansi Berbasis Umum (PABU).
2. Kelengkapan laporan keuangan PT. PLN dibuat secara transparan agar dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengakses data untuk memahami kondisi keuangan dan hasil operasional PLN, dan memantau pengelolaan resiko keuangan.
3. PT. PLN memberikan imbalan kerja dan menyediakan manfaat pasca-kerja yang dimaksudkan untuk mendukung para karyawan selama mereka bekerja dan setelah mereka pensiun.
4. PT PLN menerapkan manajemen risiko dengan membentuk Subdirektorat Manajemen Risiko. Ini menunjukkan upaya proaktif untuk menemukan dan mengelola risiko keuangan, yang berkontribusi pada kinerja operasional yang positif dan stabilitas keuangan perusahaan.
5. Pengembangan biomassa dan pemberdayaan difabel adalah contoh program CSR PLN yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini menunjukkan bahwa PLN tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Saran

1. Diharapkan PT. PLN dapat mempertahankan akuntabilitas laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk dapat mengikuti perubahan standar akuntansi.
2. Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan dihapkan PT. PLN dapat terus membuat laporan keuangan secara transparan yang mudah diakses siapapun untuk melihat kondisi keuangan dan melihat bagaimana PT. PLN mengelola resiko apa saja yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D. O., Ningsih, W. F., & Rakhmawati, R. (2023). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Referensi Ilmu UNARS (SIFEBRI'S)*, 1(1), 108–125.
- Djoko Nestri Kwartatmono, A. D. Y. (2022). Analisis Penerapan PSAK TENTANG IMBALAN KERJA PADA PT. PURNAMA AURA ELEKTRIKAL. *Jurnal Media Mahardhika*, 20(2), 214–221.
- Fernandes, H. C., Pita, J. L., Jesus, J. D., & Camara, G. M. (2021). Public Sector Accounting in Europe: A Systematic Literature Review. *International Journal of Financial Research*, 12(4), 88. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n4p88>
- Husna, P. A. B. N., Nur, M., & Firmansyah. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT PLN(PERSERO) UP3 KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, 4, 12–23.

- Jauhari, R., Sukmadilaga, C., & Mulyani, S. (2021). Implementasi dan critical success factor manajemen risiko di instansi Pemerintah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 285–298. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.11911>
- Musrifah, Aisyah Fithri Nurlaila Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana BOS : Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 1848–1863.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1). <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rompis, D., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2023). Evaluasi Penerapan PSAK 24 Tentang Imbalan Kerja-Imbalan Kerja Jangka Pendek Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1061–1068.
- Salsabilla, I. I., Jannah, E., & Juanda. (2023). Analisis Modul Ajar Berbasis Kurikulum Merdeka. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 33–41.
- Sari, R., & Muslim. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Sormin, P., Arifin, A., Andoko, A., & Yenni. (2024). Pentingnya Analisa Laporan Keuangan Pada Cv. Sumatra Abadi. *Community Development Journal*, 5(4), 6859–6864. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/31738%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/31738/21535>
- Titioaka, S. R., & Titioaka, B. M. (2021). Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Implementasi Kinerja Operasional Industri Roti Di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 76–84. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.567>
- Wikan, A. A., & Habibi, M. L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Menggunakan Rasio Solvabilitas Pada PT. PLN (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 1831–1845.
- Yunia, D., & Muttaqin, G. F. (2022). The Influence of The Quality of Financial Reports on The Performance of Public Sector Organizations. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 205–216. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4606>
- Yuniar, Latifah Sukmawati Gunarsa, Arif Asdar, Faizal Ralis, Galing Ramadhani, Aulia Putri Buntulabi, D. R. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). *Owner*, 7(2), 1017–1025. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1313>
- Yusuf, M., Febrianti, D., & Anggiani, I. (2021). Pentingnya Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat untuk Penilaian Prestasi Perusahaan Pada PT. Sat Nusapersada Tbk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3531–2544. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1434>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>

----- halaman ini sengaja dikosongkan -----